

# HUBUNGAN *DUAL ROLE CONFLICT* DAN DUKUNGAN SUAMI TERHADAP *PSYCHOLOGICAL WELL-BEING* PADA POLISI WANITA DI POLDA DIY YANG MENJALANKAN PERAN GANDA SEBAGAI IBU DAN APARAT PENEGAK HUKUM

Mutiara Nur Azizah<sup>1</sup>, Annastasia Ediaty<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, 50275

E-mail : [tiaraazizah01114@gmail.com](mailto:tiaraazizah01114@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian berpendekatan kuantitatif-korelasional ini bertujuan untuk menguji pengaruh *dual role conflict* dan dukungan suami terhadap *psychological well-being* pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda DIY yang berperan ganda sebagai ibu dan aparat negara, baik secara parsial maupun simultan. Melalui teknik *purposive sampling*, terkumpul 152 responden yang memenuhi kriteria: aktif berdinis, sudah menikah serta tinggal bersama suami, memiliki minimal satu anak, dan masa kerja  $\geq 2$  tahun. Pengumpulan data memanfaatkan tiga skala berformat Likert empat poin, sementara analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan teknik *bootstrap* (1.000 *resampling*) akibat tidak terpenuhinya asumsi normalitas. Hasil analisis mengungkapkan bahwa *dual role conflict* dan dukungan suami masing-masing memiliki hubungan positif dan signifikan secara parsial terhadap *psychological well-being* ( $B = 0,188, p < 0,001$ ; dan  $B = 0,110, p < 0,001$ ). Secara simultan, kedua variabel bebas tersebut juga terbukti berhubungan signifikan dengan *psychological well-being* ( $F = 53,62, p < 0,001$ ) dengan tingkat korelasi yang kuat ( $R = 0,647$ ). Nilai koefisien determinasi ( $R^2 = 0,419$ ) menunjukkan bahwa 41,9% variasi *psychological well-being* dipengaruhi oleh *dual role conflict* dan dukungan suami, sedangkan sisanya (58,1%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Secara keseluruhan, ketiga hipotesis diterima berdasarkan tingkat signifikansinya, meskipun arah hubungan antara *dual role conflict* dan *psychological well-being* berbeda dari rumusan hipotesis awal yang bernilai negatif.

**Kata kunci:** *dual role conflict*; dukungan suami; *psychological well-being*; polisi wanita

***THE RELATIONSHIP BETWEEN DUAL ROLE CONFLICT AND HUSBAND SUPPORT ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG POLICEWOMEN AT POLDA DIY WHO PERFORM DUAL ROLES AS MOTHERS AND LAW ENFORCEMENT OFFICERS***

Mutiara Nur Azizah<sup>1</sup>, Annastasia Ediaty<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Psychology Diponegoro University  
Prof. Mr. Sunario Street, Tembalang, Semarang, 50275

E-mail : [tiaraazizah01114@gmail.com](mailto:tiaraazizah01114@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This quantitative-correlational study aims to empirically examine the effect of dual role conflict and husband support on psychological well-being among Policewomen (Polwan) at the Special Region of Yogyakarta Regional Police (Polda DIY) who carry a dual role as mothers and law enforcement officers, both partially and simultaneously. Using a purposive sampling technique, 152 respondents who met the following criteria were collected: actively serving, married and living with their husband, having at least one child, and having a minimum of 2 years of service. Data collection utilized three four-point Likert-format scales, while data analysis used multiple linear regression with a bootstrap technique (1,000 resamples) due to the non-fulfillment of the normality assumption. The analysis results revealed that dual role conflict and husband support each had a significant positive partial relationship with psychological well-being ( $B = 0.188$ ,  $p < 0.001$ ; and  $B = 0.110$ ,  $p < 0.001$ ). Simultaneously, the two independent variables were also shown to be significantly related to psychological well-being ( $F = 53.62$ ,  $p < 0.001$ ) with a strong correlation level ( $R = 0.647$ ). The coefficient of determination ( $R^2 = 0.419$ ) indicates that 41.9% of the variation in psychological well-being is influenced by dual role conflict and husband support, while the remaining 58.1% is explained by other factors outside the model. Overall, all three hypotheses were accepted based on their significance levels, although the direction of the relationship between dual role conflict and psychological well-being differed from the initial hypothesis, which was formulated as negative.*

**Keywords :** dual role conflict; husband support; psychological well-being; police women

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia memperlihatkan evolusi yang semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi telah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional melalui keterlibatannya pada berbagai sektor pekerjaan, baik di sektor formal maupun sektor publik (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Publikasi Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa perempuan Indonesia semakin aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga (BPS, 2024). Kondisi tersebut mencerminkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, memasuki dunia kerja, serta berkontribusi dalam berbagai profesi strategis yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki (BPS, 2024; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Kemen PPPA], 2024).

Meskipun jumlah perempuan yang bekerja terus bertambah, kondisi ini belum diikuti oleh pembagian tugas rumah tangga yang lebih merata antara suami dan istri. Perempuan yang bekerja tetap dituntut menjalankan tanggung jawab domestik seperti sebelumnya, sehingga mereka pada akhirnya menjalankan dua peran sekaligus, yaitu

sebagai pekerja dan sebagai pengelola rumah tangga. Survei persepsi pekerja yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) bersama KataData Insight Centre pada tahun 2023 terhadap 2.217 pekerja di 34 provinsi di Indonesia mendukung gambaran tersebut. Sebanyak 79,3% responden perempuan mengaku menanggung beban ganda, yaitu harus menjalankan pekerjaan sekaligus tanggung jawab rumah tangga secara bersamaan, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengakuan laki-laki, yaitu hanya 61,6% responden laki-laki yang menyadari bahwa istri atau saudara perempuan mereka juga menanggung beban serupa (International Labour Organization [ILO], 2023). Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa perempuan yang telah menikah masih memikul tanggung jawab utama dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, meskipun mereka juga aktif bekerja dan turut menopang perekonomian keluarga (Kemen PPPA, 2024). Dengan demikian, perempuan kini tidak lagi dipandang sekadar pengelola rumah tangga, melainkan juga sebagai sumber daya manusia yang berkontribusi penting bagi pembangunan ekonomi dan pelayanan publik, sekaligus dituntut untuk mampu menyeimbangkan kedua peran tersebut secara bersamaan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Profil Perempuan Indonesia Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kemen PPPA menjelaskan bahwa perempuan Indonesia semakin aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk sektor pemerintahan dan pelayanan publik (Kemen PPPA, 2024). Meningkatnya akses terhadap pendidikan serta kesempatan kerja telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk memasuki profesi-profesi strategis yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh

laki-laki (Kemen PPPA, 2024). Namun demikian, meskipun perempuan semakin aktif dalam dunia kerja, tanggung jawab domestik sebagai istri dan ibu pada umumnya masih tetap melekat pada perempuan, sehingga banyak perempuan harus menjalankan dua tanggung jawab secara bersamaan, yaitu memenuhi tuntutan pekerjaan sekaligus tanggung jawab dalam keluarga (Kemen PPPA, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan perempuan bekerja lebih rentan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan keluarga, khususnya pada profesi yang memiliki tuntutan kerja tinggi.

Tingginya keterlibatan perempuan di ranah profesional kini turut merambah sektor penegakan hukum, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Polisi Wanita (Polwan) di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keterlibatan ini mencerminkan kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Seiring dinamika dan perkembangan organisasi, penugasan Polwan saat ini tidak lagi terikat pada bidang-bidang tertentu saja, melainkan telah meluas ke berbagai lini penugasan yang lebih beragam, seperti reserse kriminal, lalu lintas, intelijen keamanan, pembinaan masyarakat, hingga fungsi administrasi kepolisian. Hal tersebut menunjukkan bahwa Polwan memiliki tanggung jawab dan tuntutan profesional yang setara dengan anggota kepolisian laki-laki, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Profesi kepolisian merupakan profesi yang memiliki karakteristik pekerjaan dengan tuntutan tinggi. Anggota kepolisian dituntut untuk selalu siap menjalankan tugas selama dua puluh empat jam, bekerja dengan sistem shift, menghadapi penugasan yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta mampu memberikan respons cepat terhadap berbagai situasi yang memerlukan tindakan kepolisian. Karakteristik pekerjaan seperti ini ditandai dengan pola shift yang kompleks dan perubahan jadwal mendadak yang sulit diprediksi, sehingga sistem kerja shift menjadi salah satu kontributor utama terhadap tantangan kesehatan dan kesejahteraan personel kepolisian Ayorinde dkk. (2025). Dampak negatif dari kelelahan akibat sistem shift ini juga semakin diakui sebagai masalah serius yang memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup anggota kepolisian James dkk. (2023).

Selain itu, pekerjaan kepolisian juga dihadapkan pada beban administrasi, target kinerja organisasi, serta tekanan psikologis akibat tingginya tanggung jawab dalam menjaga keamanan masyarakat Fazrina dkk. (2024). Karakteristik pekerjaan tersebut membedakan profesi kepolisian dari sebagian besar profesi lain yang umumnya memiliki jadwal kerja lebih tetap dan dapat diprediksi. Ketidakteraturan jadwal dinas, rotasi shift, dan penugasan mendadak pada profesi kepolisian menjadikan pengelolaan waktu antara pekerjaan dan keluarga jauh lebih sulit diprediksi, sehingga anggota kepolisian rentan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama bagi anggota yang telah memiliki keluarga Sousa dkk. (2023). Temuan tersebut sejalan dengan studi kualitatif pada Polwan di Indonesia yang mengungkapkan bahwa jadwal dinas yang tidak

menentu turut memengaruhi konflik peran ganda dan kesejahteraan psikologis mereka dalam menjalankan peran pekerjaan dan keluarga secara bersamaan Rizal dkk. (2022).

Tuntutan tersebut menjadi semakin kompleks bagi Polisi Wanita yang telah menikah dan memiliki anak. Selain menjalankan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum, Polwan juga memiliki tanggung jawab dalam kehidupan keluarga sebagai istri dan ibu. Kedua peran ini sama-sama penting dan menuntut keterlibatan penuh, sehingga Polwan harus mampu membagi waktu, tenaga, dan perhatian untuk memenuhi tuntutan pekerjaan maupun keluarga secara bersamaan (Djoh & Nugrohowardhani, 2025). Sebagai gambaran skala populasi yang relevan dengan penelitian ini, berdasarkan koordinasi dengan Biro SDM Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2026, tercatat sebanyak 354 Polwan bertugas di lingkungan Polda DIY (Biro SDM Polda DIY, komunikasi pribadi, 23 April 2026). Angka ini menunjukkan perubahan dibandingkan data tahun 2019 yang mencatat 137 Polwan (Estikomah & Sahrah, 2019). Sementara itu, secara nasional Polri merekrut 1.581 Polwan dari total 24.523 personel baru sepanjang tahun 2024 (Metrotvnews, 2025). Kondisi ini menjadikan Polwan sebagai salah satu kelompok yang menghadapi tantangan tersendiri dalam menjalankan berbagai peran yang dimilikinya.

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi tersebut pada subjek penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan pada tanggal 19 Oktober 2025 melalui penyebaran Google Form yang berisi pertanyaan terbuka kepada enam Polisi Wanita di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memenuhi karakteristik penelitian, yaitu berstatus menikah, tinggal bersama suami, memiliki

minimal satu orang anak, dan memiliki masa kerja minimal dua tahun. Hasil studi pendahuluan memperlihatkan lima dari enam responden mengungkapkan bahwa jadwal dinas yang tidak menentu serta adanya penugasan di luar jam kerja seringkali menyulitkan mereka dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, sehingga peran ganda yang mereka jalani turut menekan kesejahteraan psikologis mereka sehari-hari.

Beberapa responden menyampaikan bahwa tuntutan pekerjaan masih menyebabkan mereka melewatkan waktu bersama anak, harus menyelesaikan pekerjaan setelah kembali ke rumah, serta mengalami kelelahan yang memengaruhi kualitas interaksi dengan keluarga. Hal ini tergambar dari pernyataan salah satu responden (FA), “seperti merasa kurang karena anak-anak setiap pagi selalu sudah ditinggal kerja.” Responden lain (SD) turut mengungkapkan, “tuntutan dari masing-masing peran kadang menimbulkan kelelahan dan rasa bersalah.”

Kelelahan kerja dan tekanan emosional yang dilaporkan tersebut belum tentu secara langsung menggambarkan rendahnya psychological well-being, mengingat kelelahan yang bersifat sesaat berbeda dengan kondisi psikologis yang menetap (Ryff & Keyes, 1995; Matud dkk., 2019). Meski demikian, jika dicermati lebih jauh, pernyataan responden pada studi pendahuluan di atas sebenarnya tidak sekadar menggambarkan keluhan kelelahan fisik, melainkan secara eksplisit menunjukkan kesulitan menikmati peran, rasa bersalah, serta kurangnya kepuasan terhadap pencapaian diri akibat tuntutan peran ganda yang mereka jalani. Temuan ini menunjukkan bahwa Polwan di Polda DIY menghadapi indikasi persoalan

psychological well-being yang perlu dikaji lebih lanjut secara empiris, sejalan dengan peran ganda yang mereka jalani sebagai aparat penegak hukum sekaligus istri dan ibu.

Rasa bersalah, kesulitan menikmati peran, dan kurangnya kepuasan atas pencapaian diri yang dialami para Polwan tersebut menggambarkan kondisi yang, dalam psikologi, dikaji secara sistematis melalui konsep psychological well-being (PWB). Merujuk Ryff (1989), psychological well-being merupakan kondisi optimal di mana seseorang mampu mengaktualisasikan potensinya secara maksimal. Hal ini terefleksi melalui beberapa indikator utama, meliputi penerimaan diri yang baik, kapasitas membina relasi positif, kemandirian bersikap, penguasaan lingkungan, kebermaknaan hidup (tujuan hidup), serta komitmen terhadap perkembangan diri yang berkelanjutan. Kesejahteraan psikologis tidak sekadar dimaknai sebagai ketiadaan masalah mental, melainkan representasi dari kemampuan seseorang dalam memaknai hidup, beraktualisasi secara optimal, dan tangguh menghadapi berbagai dinamika kehidupan (Ryff & Keyes, 1995).

Bagi Polisi Wanita, psychological well-being menjadi aspek yang penting karena karakteristik profesi kepolisian menuntut kesiapsiagaan, tanggung jawab yang tinggi, serta kemampuan untuk tetap profesional dalam berbagai situasi, termasuk ketika harus menghadapi tekanan pekerjaan yang berat (Fazrina dkk., 2024). Di sisi lain, Polwan yang telah menikah juga dituntut untuk menjalankan peran dalam keluarga sebagai istri dan ibu, sehingga harus mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan yang muncul secara bersamaan Rizal dkk. (2022).

Psychological well-being ialah elemen krusial bagi perempuan yang bekerja, sebab kondisi ini mencerminkan sejauh mana seorang perempuan mampu menjalankan berbagai peran yang dimilikinya secara optimal, baik dalam ranah pekerjaan maupun keluarga Matud dkk. (2019). Bagi Polwan yang berperan ganda sebagai aparat penegak hukum sekaligus istri dan ibu, tuntutan untuk hadir secara utuh dalam kedua peran tersebut secara bersamaan berpotensi menimbulkan konflik peran, di mana waktu, tenaga, dan perhatian yang dimiliki menjadi terbatas untuk memenuhi tuntutan masing-masing peran secara maksimal. Kondisi ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada rendahnya psychological well-being yang dimiliki.

Rendahnya psychological well-being pada perempuan bekerja ini turut berkaitan dengan faktor jenis kelamin, yang menurut Ryff dan Keyes (1995) memang memengaruhi pencapaian psychological well-being seseorang. Menurut social role theory, perbedaan ini terjadi karena masyarakat secara sosial menempatkan perempuan pada peran-peran yang berorientasi pada pengasuhan dan tanggung jawab domestik, sementara laki-laki lebih diarahkan pada peran sebagai pencari nafkah utama (Eagly & Sczesny, 2019). Ketika perempuan turut bekerja sebagaimana laki-laki, peran domestik yang telah melekat pada dirinya tidak serta-merta berkurang, sehingga muncul dua peran besar yang harus dijalankan secara bersamaan.

Kondisi di mana seseorang harus memikul dua tanggung jawab besar secara serentak lazim disebut sebagai konflik peran ganda (dual role conflict). Greenhaus dan Beutell (1985) memandang fenomena ini sebagai bentuk ketegangan antarperan yang timbul akibat benturan tuntutan suatu peran yang membuat seseorang kesulitan

memenuhi kewajiban pada peran lainnya. Lebih lanjut, Anwar dan Fauziah (2019) menjelaskan bahwa konflik peran ganda muncul akibat adanya kontradiksi antara ekspektasi dan kewajiban di ranah domestik (keluarga) dan ranah publik (pekerjaan).

Konflik peran ganda ini dijabarkan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, *time-based conflict*, yaitu ketegangan yang timbul akibat alokasi waktu pada suatu peran yang mengorbankan ketersediaan waktu untuk peran lainnya. Kedua, *strain-based conflict*, yakni kondisi ketika tekanan psikologis atau kelelahan dari satu ranah terbawa hingga mengganggu kinerja di ranah yang lain. Ketiga, *behavior-based conflict*, yang muncul saat pola perilaku atau sikap yang dituntut dalam satu peran tidak selaras atau bahkan berbenturan dengan ekspektasi perilaku di peran yang berbeda (Greenhaus & Beutell, 1985).

Polisi wanita merupakan profesi yang memiliki tuntutan kerja tinggi, bertugas sebagai aparat penegak hukum dan dituntut untuk siap menjalankan berbagai penugasan operasional, pendidikan, maupun tugas khusus sesuai kebutuhan organisasi (Azzahra & Halida, 2026). Bagi polisi wanita yang telah menikah dan memiliki anak, tuntutan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai istri dan ibu yang perlu memberikan perhatian, pengasuhan, serta dukungan kepada anggota keluarga (Anwar & Fauziah, 2019). Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan komitmen, waktu, tenaga, dan keterlibatan emosional yang tinggi, sehingga tuntutan pekerjaan dan keluarga sering kali muncul secara bersamaan Amstad dkk. (2011). Kondisi tersebut menyebabkan polisi wanita menjadi kelompok yang rentan mengalami *dual role conflict* (Azzahra & Halida, 2026).

Apabila dual role conflict tidak dapat dikelola dengan baik, konflik tersebut tidak hanya memengaruhi kemampuan individu dalam menjalankan peran pekerjaan maupun keluarga, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologisnya Amstad dkk. (2011). Individu yang menghadapi tuntutan pekerjaan dan keluarga secara bersamaan cenderung mengalami tekanan psikologis, kelelahan emosional, stres, serta kesulitan memenuhi harapan pada salah satu atau kedua perannya (Allen dkk., 2000; Greenhaus & Beutell, 1985). Kondisi tersebut, dalam jangka panjang, dapat menurunkan kepuasan hidup, meningkatkan risiko burnout, serta menghambat kemampuan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari Amstad dkk. (2011). Oleh karena itu, dual role conflict tidak hanya berkaitan dengan kesulitan dalam menyeimbangkan peran pekerjaan dan keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi psychological well-being individu secara menyeluruh Maksum dkk. (2022).

Keterkaitan antara dual role conflict dan psychological well-being turut diperkuat oleh berbagai studi terdahulu. Sebagai contoh, penelitian oleh Anwar dan Fauziah (2019) mengungkapkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara konflik peran ganda dan kesejahteraan psikologis pada Polisi Wanita yang telah berkeluarga di Polrestaes Semarang. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya intensitas konflik peran ganda yang dirasakan oleh seorang Polwan berbanding lurus dengan penurunan tingkat psychological well-being pada dirinya (Anwar & Fauziah, 2019).

Peran ganda yang dijalani Polwan sebagai penegak hukum sekaligus istri dan ibu dalam rumah tangga menuntut penyesuaian diri yang tidak ringan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan kepolisian yang umumnya identik dengan

kesiapsiagaan tinggi, beban kerja yang besar, jam kerja yang tidak menentu, serta risiko fisik dan psikologis di lapangan, seperti risiko cedera kerja, tekanan dari masyarakat, dan keterbatasan sumber daya Hayati dkk. (2020). Karakteristik pekerjaan tersebut menjadikan profesi kepolisian sebagai salah satu bidang kerja dengan tuntutan kesiagaan tinggi yang menuntut anggotanya, termasuk Polwan, untuk senantiasa siap menjalankan tugas kapan pun dibutuhkan Hayati dkk. (2020). Dalam kondisi tersebut, dukungan suami menjadi salah satu faktor protektif yang membantu Polwan menjaga keseimbangan antara peran domestik dan profesional.

Studi memperlihatkan dukungan yang diberikan oleh suami berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis perempuan bekerja, melalui terciptanya rasa aman, nyaman, dan keyakinan bahwa individu tidak menghadapi berbagai tuntutan tersebut seorang diri (Putriyani & Listiyandini, 2018). Selain itu, pada konteks polisi wanita yang telah menikah, dukungan suami juga terbukti berhubungan positif dengan kesejahteraan subjektif, sehingga menunjukkan pentingnya peran pasangan dalam membantu istri menghadapi berbagai tuntutan peran yang dijalani Sitorus dkk. (2022).

Menurut House (1981), dukungan sosial ialah bantuan interpersonal yang diberikan oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan penerima dalam bentuk dukungan emosional, penghargaan, instrumental, dan informasional. Dalam konteks hubungan pernikahan, keempat bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui peran suami sebagai sumber dukungan utama bagi istri dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan. Sejalan dengan konsep tersebut, Putriyani dan Listiyandini (2018) menjelaskan bahwa dukungan suami merupakan bantuan yang diberikan oleh suami

sehingga istri merasa nyaman secara fisik maupun psikologis, serta merasakan adanya perhatian, kepedulian, dan tempat bergantung ketika menghadapi berbagai tekanan akibat peran yang dijalannya. Temuan tersebut didukung oleh Yosita dkk. (2022) yang menemukan bahwa dukungan suami berhubungan positif dengan psychological well-being pada ibu yang menjalankan peran ganda. Hasil ini memperlihatkan semakin baik dukungan yang diberikan suami, semakin baik pula kondisi kesejahteraan psikologis yang dimiliki istri.

Kondisi yang berbeda dapat terjadi ketika polisi wanita tidak memperoleh dukungan suami yang memadai. Kurangnya keterlibatan suami, baik dalam memberikan dukungan emosional maupun membantu tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, dapat menyebabkan beban peran ganda lebih banyak ditanggung oleh istri. Akibatnya, polisi wanita menjadi lebih rentan mengalami konflik antara tuntutan pekerjaan dan keluarga. Hal tersebut didukung oleh studi Utami dan Wijaya (2018) yang memperlihatkan dukungan sosial dari pasangan berhubungan negatif secara signifikan dengan konflik pekerjaan-keluarga. Artinya, semakin rendah dukungan yang diterima dari pasangan, semakin tinggi konflik peran yang dirasakan oleh istri. Kondisi ini menjadi perhatian penting pada polisi wanita, mengingat profesi kepolisian menuntut kesiapsiagaan tinggi, jam kerja yang tidak menentu, serta pelaksanaan berbagai tugas operasional yang dapat mengurangi waktu bersama keluarga Hayati dkk. (2020). Oleh karena itu, keterbatasan dukungan dari suami berpotensi memperbesar kesulitan polisi wanita dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Tidak hanya meningkatkan konflik peran, kurangnya dukungan suami juga berkaitan dengan munculnya berbagai permasalahan psikologis, salah satunya burnout. Muna dan Indrawati (2022) mengungkapkan minimnya dukungan sosial dari suami berkorelasi dengan tingginya tingkat burnout pada ibu rumah tangga, yang dimanifestasikan melalui kelelahan fisik maupun emosional serta merosotnya pencapaian diri. Temuan tersebut sejalan dengan riset Nugraha dan Kustanti (2018) yang mengonfirmasi adanya hubungan negatif yang signifikan antara dukungan suami dan konflik peran ganda pada pegawai perempuan; artinya, peningkatan dukungan suami akan menekan intensitas konflik peran ganda yang dirasakan. Keterkaitan ini turut diperkuat oleh Almasitoh (2011) yang menyimpulkan bahwa konflik peran ganda dan dukungan sosial secara simultan memberikan kontribusi terhadap tingkat stres kerja di kalangan pekerja perempuan, menunjukkan bahwa dukungan dari lingkungan sosial, termasuk rekan kerja, turut berperan dalam membantu individu menghadapi tuntutan peran ganda yang dijalani. Dukungan suami, dengan demikian, memiliki fungsi yang lebih spesifik dalam pemenuhan kebutuhan emosional dan bantuan menjalankan tanggung jawab keluarga, yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh sumber dukungan lain di lingkungan kerja.

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas betapa vitalnya kehadiran dukungan suami bagi para Polisi Wanita dalam mengelola peran ganda mereka. Peran suami tidak hanya berfungsi meredakan ketegangan antara urusan pekerjaan dan rumah tangga serta menekan risiko kelelahan mental (burnout), tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kesejahteraan psikologis yang prima. Peran krusial ini sejalan dengan

hasil riset Sitorus dkk. (2022) yang mencatat adanya korelasi positif antara dukungan suami dan kesejahteraan subjektif pada Polwan berumah tangga. Dengan demikian, dukungan dari pasangan dapat diandalkan sebagai elemen esensial yang memungkinkan Polwan menjaga keseimbangan hidup antara karier dan keluarga, sekaligus mengoptimalkan kondisi mental mereka.

Pemilihan variabel dalam studi ini dilandasi oleh sintesis antara temuan riset terdahulu dan dinamika faktual dari peran ganda yang diemban oleh para Polisi Wanita. Meskipun topik mengenai korelasi antara dual role conflict dan psychological well-being pada Polwan telah banyak dikaji, sejumlah keterbatasan dari studi sebelumnya mendasari urgensi pelaksanaan penelitian ini. Pertama, inkonsistensi arah hubungan antarvariabel masih kerap ditemui. Penelitian oleh Anwar dan Fauziah (2019) di Polrestaes Semarang serta Yani dan Pratama (2023) di Polda Sumatra Barat menemukan korelasi negatif, yang mengindikasikan bahwa tingginya konflik peran ganda menurunkan kesejahteraan psikologis. Sebaliknya, studi terbaru oleh Azzahra dan Halida (2026) di Polres Tulungagung justru mendapati adanya korelasi positif. Variasi temuan ini menegaskan pentingnya pengujian ulang guna melihat konsistensi hubungan kedua variabel tersebut pada latar karakteristik responden serta konteks institusional yang berbeda.

Kedua, studi-studi sebelumnya cenderung membatasi model penelitian dengan hanya menggunakan satu prediktor, yakni dual role conflict, dalam memprediksi psychological well-being Polisi Wanita. Padahal, kesejahteraan psikologis merupakan konstruksi kompleks yang tidak semata-mata ditentukan oleh konflik peran, tetapi juga

oleh kehadiran faktor protektif yang memfasilitasi individu dalam mengelola beban peran ganda. Dalam konteks ini, dukungan suami dihipotesiskan sebagai variabel krusial yang berfungsi sebagai sumber dukungan primer dalam lingkup domestik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut dengan menguji pengaruh dual role conflict dan dukungan suami secara simultan terhadap psychological well-being, guna menyajikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai determinan kesejahteraan psikologis bagi para Polisi Wanita.

Ketiga, keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada konteks penelitian yang masih dilakukan pada institusi kepolisian yang berbeda, yaitu Polrestabes Semarang, Polda Sumatra Barat, dan Polres Tulungagung. Hingga saat ini, penelitian yang mengkaji hubungan dual role conflict dan persepsi dukungan suami terhadap psychological well-being pada Polisi Wanita di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta belum banyak ditemukan. Padahal, karakteristik organisasi, beban kerja, serta tuntutan operasional pada setiap satuan kepolisian dapat berbeda, sehingga berpotensi memengaruhi pengalaman konflik peran maupun kondisi kesejahteraan psikologis anggotanya.

Berdasarkan beberapa keterbatasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian dengan menguji hubungan dual role conflict dan persepsi dukungan suami terhadap psychological well-being pada Polisi Wanita di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan aparat penegak hukum. Studi ini dapat memberikan bukti empiris yang memperkaya temuan

sebelumnya, baik dari sisi konsistensi hubungan antar variabel, pengembangan model penelitian, maupun konteks penelitian pada institusi kepolisian.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat hubungan antara *dual role conflict* dengan *psychological well-being* pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda DIY yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan aparat penegak hukum?
2. Apakah terdapat hubungan antara dukungan suami dengan *psychological well-being* pada Polwan di Polda DIY yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan aparat penegak hukum?
3. Apakah terdapat hubungan antara *dual role conflict* dan dukungan suami dengan *psychological well-being* pada Polwan di Polda DIY yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan aparat penegak hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *dual role conflict* dengan *psychological well-being* pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda DIY yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan aparat penegak hukum.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan *psychological well-being* pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda DIY yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan aparat penegak hukum.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *dual role conflict* dan dukungan suami dengan *psychological well-being* pada Polisi Wanita

(Polwan) di Polda DIY yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan aparat penegak hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Mampu memperkaya khazanah ilmu psikologi, khususnya dalam ranah Psikologi Klinis, melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kejiwaan perempuan yang memikul tanggung jawab ganda sebagai ibu sekaligus aparat penegak hukum. Di samping itu, temuan dari penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas literatur ilmiah terkait korelasi antara konflik peran ganda dan tingkat kesejahteraan psikologis, serta memberikan dasar empiris bagi pengembangan model intervensi kesejahteraan mental pada perempuan bekerja di institusi dengan tuntutan tinggi seperti kepolisian.

##### **2. Manfaat Praktis**

Studi ini juga diorientasikan untuk memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil studi ini diharapkan mampu mendatangkan sejumlah kegunaan secara aplikatif:

###### **a. Bagi Partisipan**

Studi ini dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai bagaimana konflik peran ganda dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis. Pemahaman ini dapat membantu Polwan mengenali sumber stres yang timbul dari tumpang tindih antara peran profesional dan peran domestik,

serta mengembangkan strategi penyesuaian diri yang lebih adaptif. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam membantu Polwan menjaga keseimbangan emosional, meningkatkan ketahanan psikologis, dan mempertahankan kinerja optimal di tengah tuntutan pekerjaan dan keluarga.

b. Bagi Institusi Kepolisian

Studi ini mampu menjadi landasan strategis bagi instansi dalam menyusun kebijakan serta program pembinaan yang berfokus pada kesehatan mental personel, utamanya bagi mereka yang harus menyeimbangkan tugas sebagai ibu rumah tangga dan abdi negara. Lebih dari itu, temuan dari riset ini dapat dijadikan acuan penting dalam merancang berbagai program intervensi maupun fasilitas pendukung yang tepat sasaran di dalam lingkungan institusi kepolisian, seperti pengembangan program pengelolaan stres, layanan konseling terkait pekerjaan, maupun penyesuaian kebijakan kerja yang lebih peka terhadap kebutuhan polisi wanita. Melalui pemanfaatan tersebut, institusi kepolisian diharapkan mampu membangun suasana kerja yang lebih kondusif, ramah, serta mendukung keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi ilmiah dan dasar empiris dalam mengkaji topik serupa pada konteks yang berbeda. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai variabel-variabel yang berpengaruh

terhadap kesejahteraan psikologis individu dengan peran ganda, serta mendorong penelitian lanjutan yang menelaah peran variabel mediator atau moderator, seperti dukungan sosial, coping strategies, dan resiliensi. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkaya arah pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi klinis dan psikologi kerja yang berfokus pada isu kesejahteraan mental perempuan bekerja.